

# SUMBER-SUMBER PERDAMAIAN DALAM HUBUNGAN PRIBUMI-TIONGHOA DI KOTA YOGYAKARTA

Endah Setyowati<sup>⊕</sup>

## Abstract

Yogyakarta, like other cities in Indonesia, is inhabited by *Tionghoa* minority which has contributed significantly to the city's economic growth. However, the number of conflicts between *Pribumi* (Native Indonesians) and *Tionghoa* in Yogyakarta is minimal, even when the government's ambiguous policy towards the *Tionghoa* reached its climax during the New Order (Orde Baru) Regime. The following research was conducted as a qualitative study in order to discover the sources of peace in the relationship between *Pribumi* and *Tionghoa* in Yogyakarta. Data regarding perception, attitude, and behavior in the relationship was analyzed at the intra-ethnic, inter-ethnic and national levels. Although this analysis provides only a general framework, it is a sufficient conflict management model to avoid potential conflict between the *Pribumi* and The *Tionghoa* in Yogyakarta.

The domination of Javanese culture in Yogyakarta resulted in typical Javanese perceptions, attitudes and behaviors between *Pribumi* and *Tionghoa* at the intra-ethnic and inter-ethnic levels. The *Tionghoa* were accepted as neighbors (a form of *Pribumi* solidarity) because they adopted Javanese culture, language and norms-based attitudes. Non-solidarity appeared in public places where the state norms and rules were applied, such as educational institutions. This study shows that ethnic difference, linked with religious sentiment creates the potential for conflict between The *Pribumi* and The *Tionghoa* in public sphere. Government rules produces certain perceptions, attitudes, and behaviors towards The *Tionghoa* that may be spread to the inter-ethnic relationship. As such, a conflict prevention system that is based on community need and initiative should be developed as an alternative to the dominant culture in the event that the dominant culture can no longer prevent the conflict

**Kata-kata kunci:** *intra-ethnic*, *inter-ethnic*, peranan pemerintah, dominasi kultural, pencegahan konflik.

## Pendahuluan

Realitas keberadaan Orang Tionghoa di Indonesia berada dalam situasi yang kompleks. Faktor utama adalah pada proses pembentukan nasion yang dibangun dengan mendasarkan kepribumian dengan tingkatan pemilikan atau pemanfaatan sumber daya yang ada dalam suatu wilayah. Kepribumian menjadi isu kritis bagi posisi orang Tionghoa karena dalam realitas hubungan antarsuku bangsa Orang

---

<sup>⊕</sup> Dra. Endah Setyowati, M.Si. adalah Dosen pada Fakultas Teknik Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta

Tionghoa dipandang sebagai orang asing, pendatang, bukan orang Indonesia. Pengintegrasian orang Tionghoa sulit terwujud bukan karena tiak ada keinginan untuk menjadi bagian nasion Indonesia tetapi karena penolakan untuk menjadikan bagian dari solidaritas besar masyarakat Indonesia. ( Suparlan 2002: 70, 85-86; Bachtiar 1976:101-11) Lebih lanjut, kebijakan negara yang ambigu terhadap orang Tionghoa dalam bentuk Keleluasaan di bidang ekonomi seiring dengan batasan-batasan dalam hukum dan politik yang pada gilirannya memposisikan orang Tionghoa rentan secara vertikal dan horisontal.

Persoalan yang muncul kemudian adalah kerentanan hubungan antara Pribumi dan Tionghoa yang mempengaruhi keberadaan Indonesia sebagai negara yang bersifat majemuk. Oleh karena itu, penelitian ini akan memfokuskan kepada persepsi, sikap, dan perilaku yang melahirkan perdamaian dalam hubungan antara Pribumi dan Tionghoa di Kota Yogyakarta. Perdamaian di sini lebih ditekankan kepada fakta bahwa di Yogyakarta potensi konflik berbasis etnik atau agama bukannya tidak ada namun mengapa mekanisme pencegahan itu dapat berkerja baik di dalam masyarakat setidaknya dibandingkan dengan Kota Solo yang hanya berjarak 60 Kilometer dan sama-sama menjadi kiblata budaya Jawa. Kerusuhan terakhir di Kota Solo yang terjadi antara tanggal 14-16 Mei 1998 merupakan peristiwa ke-11 dan sebagai peristiwa ke-7 dalam gesekan antara pribumi dan Tionghoa sepanjang abad XX di Solo (Mulyadi dan Soedarmono 1999:4-5). Dari penelitian di Yogyakarta, diharapkan temuan-temuan penelitian yang berkenaan dengan gambaran umum yang diharapkan seperti corak hubungan Pribumi dan Tionghoa yang semacam apa yang potensial menimbulkan konflik kekerasan; faktor apakah yang dibutuhkan untuk mendorong integrasi kelompok Pribumi dan Tionghoa sehingga dapat berkoeksistensi secara damai, serta apa yang diperankan negara dalam merespon potensi konflik Pribumi dan Tionghoa Pribumi.

Hipotesis yang diajukan adalah apabila hubungan intraetnik kuat, maka ia akan potensial terhadap konflik dalam hubungan Pribumi-Tionghoa. Apabila hubungan interetnik kuat, maka ia akan mempromosikan perdamaian (Varney 2001: 362). Sementara itu juga akan dilihat bagaimana peran negara dalam mewarnai corak hubungan Pribumi- Tionghoa. Berpijak pada hipotesis ini, maka penelitian akan difokuskan pada pendekatan terhadap tiga level analisis yakni, sukubangsa, antarsuku bangsa, dan sistem nasional yang direpresentasikan oleh pandangan terhadap persepsi, sikap, dan perilaku negara.

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian deskriptif dengan menggunakan data-data yang bersifat kualitatif. Pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka dan tertutup diajukan kepada para responden dengan berpijak pada tiga pertanyaan penelitian yang meliputi orientasi etnisitas orang Tionghoa di Yogyakarta; apa yang menjadi potensi konflik dalam hubungan Tionghoa Pribumi; serta bagaimana sikap dan perilaku responden terhadap kebijakan negara pada masalah hubungan etnik Tionghoa dan Pribumi (Suparlan 1999; Permata 2003; Incis 2005). Langkah berikutnya adalah membuat peta sosial lewat *social knowledge* peneliti guna menentukan responden berdasarkan kategori-kategori wilayah pengelompokan etnik dan atau agama. Kategori wilayah yang tersusun dapat dibagi menjadi tiga wilayah besar yakni Eksklusif, Dominan, dan Campuran. Dari masing-masing tiga wilayah besar itu akan terdapat variasi-variasi seperti berikut (1) Eksklusif Tionghoa, (2) Eksklusif Pribumi dan Eksklusif Muslim, (3) Dominan Tionghoa dan Agama yang Majemuk, (4) Dominan Pribumi dan Dominan Muslim, (5) Dominan Pribumi dan Agama yang Majemuk, (6) Dominan Kristen Katolik dan Dominan Pribumi (Jawa), (7) Dominan Kristen Protestan dan Etnik yang Majemuk, (8) Campuran Tionghoa-Pribumi dan Agama yang Majemuk.

Penelitian ini mengumpulkan data dan informasi dari responden yang berkategori massa dan elit. Responden berkategori massa yang berjumlah 141 responden, 113 diantaranya beretnik Tionghoa dan sisanya adalah pribumi. Responden pribumi dipilih jika mereka menjadi kelompok minoritas dalam hal agama di lingkungannya, atau sebaliknya pada wilayah eksklusif atau dominan Pribumi akan dipilih responden dengan etnik yang minoritas. Hal ini dimaksud untuk menemukan informasi corak hubungan keseharian yang bersifat lintas etnis dan lintas agama dalam wilayah yang didominasi oleh etnis atau agama tertentu. Berikut di bawah ini adalah gambaran responden kategori massa secara umum :

**Tabel 1**

**Sebaran Responden Berdasar Kategori Umur dan Gender**

| <b>Usia (tahun)</b> | <b>Laki-Laki</b> | <b>Perempuan</b> | <b>Jumlah</b> |
|---------------------|------------------|------------------|---------------|
| 50 ke atas          | 36               | 21               | 57            |
| 30-49               | 35               | 25               | 60            |
| 21-48               | 14               | 10               | 24            |
| <b>Jumlah</b>       | <b>85</b>        | <b>56</b>        | <b>141</b>    |

*Social knowledge* juga digunakan untuk menentukan para pimpinan asosiasi dalam lingkup kota Yogyakarta yang ditetapkan menjadi (8) delapan kategori yakni, Agama, Sosial, Pendidikan, Politik, Polisi, Militer, Birokrasi, dan Bisnis. Tekanan pada survei elit ini adalah proporsi yang hampir seimbang antara Etnik Tionghoa dan Pribumi. Dalam rentang waktu penelitian telah terkumpul 37 Responden kategori elit dengan gambaran sebagai berikut:

**Tabel 2**

**Sebaran Responden Elit Berdasarkan Kategori Jenis Organisasi**

| Kategori       | Etnik   |          | Jumlah    |
|----------------|---------|----------|-----------|
|                | Pribumi | Tionghoa |           |
| Sosial         | 1       | 5        | 6         |
| Agama          | 1       | 3        | 4         |
| Bisnis         | 2       | 3        | 5         |
| Pendidikan     |         | 2        | 2         |
| Politik        | 9       | 1        | 10        |
| Birokrasi(PNS) | 1       | 3        | 4         |
| Polisi         | 4       |          | 4         |
| Militer        | 2       |          | 2         |
| <b>Jumlah</b>  | 20      | 17       | <b>37</b> |

Berkenaan dengan pengelolaan inferensi deskriptif, King, Keohane, dan Verba menawarkan sebuah model yang akan dicobakan dalam penelitian ini. Pertama,  $y$  adalah responden Tionghoa kategori massa dan ke dua,  $n$  adalah jumlah orang Tionghoa di seluruh wilayah yang diteliti (unit). Perangkat observasi yang dilabelkan dengan  $y$ , diistilahkan oleh King, Keohane, dan Verba sebagai variabel yang terealisasikan yang nilai-nilainya berbeda-beda terhadap  $n$ .  $y$  merupakan suatu variabel acak karena secara acak menguraikan replikasi hipotetik. Jadi  $y$  adalah jumlah responden yang memberikan jawaban yang sama terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di semua wilayah penelitian sehingga dianggap merepresentasikan informasi yang dibutuhkan untuk menguji asumsi, hipotesis, maupun memberikan gambaran umum. Metode ini dapat dilakukan dengan prasyarat terdapatnya kondisi atau pengalaman yang lebih kurang lebih serupa yang dialami

para responden diobservasi (Garry King, Robert O Keohane dan Sidney Verba 1994 : 56-57). Cara lain yang dapat dilakukan untuk mengelola inferensi adalah dengan kejenuhan data. Artinya  $y$  dapat terus ditambahkan hingga tidak memberikan informasi baru. Contoh penggunaan dari pendekatan ini adalah ketika kepada semua responden Tionghoa kategori massa ( $y_1, y_2, \dots$ ) di seluruh wilayah kategori yang mewakili  $n$  diajukan pertanyaan tentang siapakah tokoh nasional yang dianggap pahlawan. Jawaban yang diberikan hanya berkisar pada 2 nama tokoh nasional dari seluruh responden di seluruh wilayah kategori sehingga menguatkan asumsi bahwa tokoh-tokoh yang memberikan perhatian terhadap pengurangan diskriminasi terhadap etnik Tionghoa secara khusus dan dikenal beraliran nasionalis merupakan pahlawan bagi etnik Tionghoa. Adapun wawancara mendalam juga dipilih sebagai cara untuk memahami informasi dari fakta-fakta yang tidak teramati yang datang sebelumnya dari fakta-fakta yang telah diobservasi diobservasi (Garry King, Robert O Keohane dan Sidney Verba 1994 : 34)

### **Orientasi Suku Bangsa**

Parsudi Suparlan menyatakan bahwa suku bangsa adalah golongan sosial yang khusus, yang bersifat askriptif sama halnya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Dikatakan khusus, karena ia diperoleh secara askriptif yang begitu saja didapat ketika manusia di lahirkan dan muncul dalam interaksi berdasarkan adanya pengakuan oleh warga suku bangsa lainnya. Suku bangsa adalah ciri-ciri umum dan mendasar yang berkenaan dengan asal muasal manusia yang digunakan sebagai acuan bagi identitas dan jati diri pribadi atau kelompok yang tidak dapat ditiadakan meskipun dapat disimpan dan tidak digunakan dalam interaksi. Ciri-ciri ini sering dikatakan sebagai ciri-ciri yang primordial. Secara kognitif dan afektif suku bangsa adalah yang utama dan berlaku secara universal di dalam kehidupan manusia (Parsudi Suparlan dalam I. Wibowo 1999: 153) Corak askriptif dari kesukubangsaan bersumber pada hubungan kekerabatan, baik melalui keturunan atau melalui perkawinan, dan keterikatan pada daerah asal. melalui hubungan-hubungan kekerabatan dan daerah asal maka kebersamaan atau sosiasi dapat dibangun dan dimantapkan. Melalui sosiasi ini, solidaritas sosial atas dasar kesukubangsaan diciptakan, dibentuk, dan digunakan untuk berbagai kepentingan ekonomi dan politik dengan mengatasnamakan kepentingan kelompok (Parsudi Suparlan dalam Andreas Pardede 2002: 87) Hipotesis yang dapat diajukan adalah apabila keterikatan

suatu etnik terhadap komunitas dan nilai-nilai etnik sendiri, pada tataran sikap merupakan suatu yang alamiah. Sebaliknya apabila simbol-simbol etnik digunakan untuk menggalang solidaritas kelompok kemudian prasangka dan stereotip terhadap kelompok suku bangsa yang berbeda berkembang, maka potensi konflik antaretnik sudah ada dalam bentuk laten.

Dalam penelitian ini, orientasi suku bangsa meliputi pemahaman para responden Tionghoa terhadap riwayat keluarga dan elemen-elemen yang bersifat primordial dan situasional. Bagaimana keterikatan orang Tionghoa terhadap nilai-nilai suku bangsanya yang mewujud pada persepsi, sikap dan perilaku interaksi dengan pribumi.

### **Orientasi Antarsuku Bangsa**

Di ranah publik di perkotaan setiap orang akan tahu bahwa seseorang yang dihadapinya di tempat itu adalah orang Jawa, Tionghoa atau lainnya dari penampilan fisik atau setidaknya dari logat bicaranya. Sebagai ruang sosial dalam hubungan antarsuku bangsa, maka para pelaku di ranah publik akan menggunakan suku bangsa dan kebudayaan masing-masing dalam menilai atau dinilai. Mereka juga mengaktifkan seperangkat unsur dari kebudayaan yang mereka anggap sebagai atribut sehingga terciptalah batas-batas. Batas-batas suku bangsa ini berguna dalam menunjukkan perbedaan dengan mereka yang tergolong dalam satu suku bangsa yang lain. Melalui batas-batas itu pula stereotip yang dimiliki masing-masing suku bangsa dapat terwujud sehingga perbedaan-perbedaan antar suku bangsa dapat terwujud (Suparlan 1999:164).

Ashutosh Varney menyebutkan bahwa interaksi keseharian antaretnik yang berbeda dilandasi suatu *engagement* dalam bentuk asosiasi yang bersifat formal dan *engagement* kehidupan sehari-hari. Asosiasi bisnis, organisasi profesional, kelompok pembaca, film, klub olah raga, LSM, serikat buruh kader partai politik adalah contoh bentuk yang pertama. Bentuk *engagement* keseharian terdiri atas interaksi rutin sehari-hari, seperti keluarga-keluarga saling kunjung dari komunitas berbeda, makan bersama secara teratur, partisipasi bersama dalam acara dan mengizinkan anak-anak mereka bermain bersama dalam kehidupan bertetangga. Dua bentuk *engagement*, jika kuat mempromosikan perdamaian sebaliknya ketiadaannya atau ada namun lemah akan membuka ruang bagi konflik antaretnik (Varney 2001: 362)

Dalam penelitian ini, gambaran umum hubungan Pribumi dan Tionghoa itu digali dari sejumlah pertanyaan meliputi lingkungan ketetanggaan, lingkungan kerja dan kerjasama dengan suku bangsa yang berbeda, posisi kultur yang dominan, serta persepsi, sikap, dan perilaku yang diperlihatkan oleh suku yang berbeda yang muncul dalam interaksi di ranah publik.

### **Pandangan terhadap Negara dan Media Massa**

Loyalitas sukubangsa/etnik terhadap negara nasional bukan suatu proses yang terjadi secara alamiah. Sesuai dengan sifat resiprokal pada setiap proses interaksi sosial, loyalitas suku bangsa kepada pemerintah negara mempunyai hubungan timbal balik dengan loyalitas pemerintah negara terhadap aspirasi dan kepentingan suku bangsa/etnik. Semakin baik posisi, kinerja, dan manfaat negara, semakin besar kemungkinan loyalitas terhadap negara ditumbuhkan, dipelihara, serta dikembangkan oleh negara nasional (Bahar dalam Ichlasul Amal dan Armaidly Armawi 1995:141). Penelitian ini akan melihat perspektif etnik Tionghoa Yogyakarta terhadap kinerja pemerintah negara dalam hubungan antara mereka dengan kelompok Pribumi. Adapun pandangan terhadap media massa juga akan mendapatkan perhatian dalam penelitian ini karena bertolak dari asumsi besarnya daya pengaruh media massa dalam membangun opini yang menentukan persepsi, sikap, dan perilaku negara terhadap warganegaranya dan sebaliknya.

### **Hasil Temuan Penelitian**

Hasil penelitian terhadap orientasi suku bangsa orang Tionghoa di Yogyakarta tidak menunjukkan kerawanan dalam hubungannya dengan etnik Pribumi. Keterikatan terhadap nilai-nilai etnik hanya tertinggal pada nilai seperti misalnya etos kerja yang menjadi stereotip keturunan perantau. Persepsi responden Tionghoa terhadap perbedaan nilai etos kerja dengan pribumi merupakan landasan supremasi etnik Tionghoa atas Pribumi dalam tataran persepsi. Adapun sikap yang ditunjukkan atas supremasi itu adalah sikap penyesuaian yang luwes dalam arti tanpa banyak menimbulkan perilaku konflik dengan pribumi sehingga melahirkan citra sebagai warga yang tekun bekerja di mata pribumi. Persepsi superioritas dalam etos kerja juga ditunjukkan dengan sikap dan perilaku agar Pribumi bersedia mengikuti sikap dan perilaku yang orang Tionghoa dalam gaya hidup, meraih prestasi, dan ketekunan dalam berusaha. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa

orang Tionghoa di Yogyakarta memiliki pemahaman yang amat memadai terhadap kultur Jawa yang dominan di Yogyakarta dan memilih sikap mengalah dan mengakui supremasi kultur Jawa dengan alasan yang rasional, yakni ketentraman hidup yang sulit diperoleh oleh orang Tionghoa di luar Yogyakarta.

Pengabaian terhadap Bahasa Tionghoa, baik bahasa suku ataupun nasional (Mandarin) secara sukarela maupun atas kebijakan pemerintah Negara, di sisi lain secara mewujudkan penerimaan terhadap dominasi kultural dari Budaya Jawa. Dengan demikian, orang Tionghoa mengadaptasi kultur Jawa dengan baik sehingga memberikan stereotip yang membedakannya stereotip Tionghoa di mata Pribumi di Yogyakarta. Melemahnya keterikatan orang Tionghoa terhadap suku bangsa juga ditunjukkan dengan minat yang minim untuk bergabung dalam organisasi-organisasi dengan basis identitas etnik yang muncul kembali sejak runtuhnya rejim Orde Baru. Dalam prosentase yang kecil, hanya orang Tionghoa yang berkategori pengusaha yang menunjukkan minatnya terhadap organisasi kesukuan.

Dalam level hubungan antar suku bangsa, orang Tionghoa berada dalam konteks keseharian dimana suku Jawa sebagai penduduk asli dan mayoritas penduduk Yogyakarta yang hidup berdampingan dengan minoritas etnis pendatang yang bersifat temporer. Sifat temporer itu karena sebagian besar pendatang adalah mahasiswa dan tidak terikat dengan lingkungan di sekitarnya. Pola migrasi yang menciptakan heterogenitas yang non permanen itu menyebabkan etnis pendatang tidak pernah mampu menciptakan akar sosialnya di Yogyakarta. Demikian halnya dengan para pendatang permanen, tinggal secara tersebar dan tidak mengelompok pada pemukiman yang didominasi suku atau etnik tertentu. Di Yogyakarta memang terdapat dua daerah Pecinan namun secara ketetapan, kultur Jawa yang menjadi acuan dalam berinteraksi sehari-hari yang dapat ditunjukkan dengan sikap dan perilaku Kejawaan. Dengan demikian, di permukaan tampak dominasi Jawa tampil sebagai kultur yang tidak tertandingi oleh etnis lain sehingga memudahkan pola penerimaan para pendatang terhadap budaya Jawa. Edward M Bruner seperti dikutip oleh Parsudi Suparlan Tim Fisipol UGM 2000:99; Suparlan dalam I Wibowo 1999:161) menyoratkan eksisnya kultur yang dominan bagi proses integrasi etnis-etnis di perkotaan di Indonesia.

Di dalam keseharian, kultur Jawa juga bekerja lewat saluran-saluran yang ada terutama organisasi lingkungan yang mempertemukan warganya dengan landasan nilai-nilai dan norma-norma yang dirasakan cocok dengan orang Tionghoa

yang tinggal dan menetap di Yogyakarta. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa organisasi lingkungan yang mengutamakan prinsip *guyub*, dan *ra sah rame-rame* melahirkan mekanisme pencegahan konflik dan perdamaian dalam lingkungan ketetanggaan. Warga asli Yogyakarta, berkat kesejarahan maupun predikat kotanya sebagai kota budaya dan pendidikan, menunjukkan keterbukaan terhadap pendatang dengan budaya latar belakang budaya berbeda. Melalui interaksi sehari-hari, kultur Jawa mempengaruhi pembentukan persepsi, sikap, dan perilaku dalam hubungan lintas etnik dalam lingkup ketetanggaan. Lingkungan yang aman, hubungan yang harmonis berlandaskan kultur Jawa, dan penerimaan oleh pribumi ditemukan dalam ketetanggaan. Dominasi kultur juga tampak pada partisipasi Orang Tionghoa di Yogyakarta di sektor perdagangan yang memang menonjol namun tidak cukup memicu kecemburuan sosial pribumi. Orang Tionghoa Yogyakarta amat sensitif terhadap prasangka dan stereotip etniknya di kalangan pribumi, memilih sikap dan perilaku yang harmonis dengan lingkungannya.

Sekalipun demikian, integrasi secara kultur yang terjadi di level ketetanggaan, bekerja secara berbeda pada bidang sosial dan politik. Faktor utamanya dapat ditemukan pada kebijakan standar ganda pemerintah negara terhadap etnik Tionghoa yang dilakukan sejak jaman Penjajahan hingga hingga dewasa ini. Terjemahan dari kebijakan nasional di level hubungan antar suku bangsa adalah sikap dan perilaku yang didasarkan pada prasangka dan stereotip terhadap etnik Tionghoa di ranah publik misalnya di lembaga pendidikan atau lingkungan kerja. Jalan ke luar yang banyak dipilih dalam mengatasi prasangka itu tampak pada gejala identitas Tionghoa yang membingungkan dan memilih identitas berdasarkan tuntutan situasi.

Satu variabel dalam hubungan dengan Pribumi yang menyumbangkan potensi konflik dalam hubungan di tempat itu baik secara intraetnis maupun interetnis adalah gejala penguatan sentimen agama misalnya penerapan kebijakan nasional di daerah seperti misalnya UU SIKDIKNAS. Dalam satu dekade terakhir penguatan Islam juga memperkuat sentimen agama orang Tionghoa yang beragama Kristen sebagai pilihan agama orang Tionghoa di Yogyakarta sejak pertengahan tahun 1970an. Ekspresi budaya Tionghoa juga kebebasan untuk menganut kembali Konghucu dalam prosentase kecil penganutnya di kalangan Tionghoa, melihat kemungkinan SIKDIKNAS sebagai cara untuk memperkenalkan kembali ajaran Konghucu di sekolah-sekolah Kristen-Katolik yang menjadi pilihan para orang tua

Tionghoa untuk pendidikan anak-anaknya. Sekolah-sekolah berbasis agama Kristen Protestan dan Kristen Katolik memang menjadi pilihan karena dianggap akomodatif terhadap anak-anak Tionghoa namun mempersempit peluang interaksi dengan kelompok yang pada gilirannya akan memelihara prasangka etnik sekaligus agama. Lebih jauh lagi, kekhawatiran terhadap sentimen anti Tionghoa yang muncul dari gejala penguatan agama sebenarnya juga merupakan ancaman bagi hubungan antarsukubangsa dan antaragama di Yogyakarta pada level ranah publik.

Peran negara yang mewujud pada pemerintah beserta institusi-institusi, aparat, dan kebijakannya dalam level nasional, dalam perspektif orang Tionghoa Yogyakarta tidak menyumbangkan dukungan bagi integrasi orang Tionghoa secara sosial dan politik. Orang Tionghoa Yogyakarta membedakan antara sikap dan perilaku institusi negara yang merupakan perpanjangan pemerintah pusat dan institusi negara di daerah, khususnya dalam pelayanan oleh aparat birokrasinya. Kantor Imigrasi yang tetap memberlakukan ketentuan SKBRI sebagai syarat pengajuan paspor penduduk Tionghoa. Sekalipun *statement* kepala daerah di media massa dan surat keputusan yang dikeluarkan telah menghapuskan ketentuan itu. Dalam masalah ini, pemerintah daerah tidak dapat berbuat banyak karena Kantor Imigrasi bukan dalam wewenang Pemerintah Daerah.

Di dalam perannya di Yogyakarta, negara yang identifikasi sebagai DPRD, Polisi dan Militer dan serta Pemerintah Daerah mendapat tanggapan yang berbeda-beda dari orang Tionghoa. DPRD Kota tidak cukup aspiratif mengartikulasikan kepentingan orang Tionghoa terutama dalam pengurangan diskriminasi dalam bidang hukum dan pendidikan. Orang Tionghoa patuh terhadap kebijakan-kebijakan negara demi rasa aman dari ancaman yang diskriminasi yang lebih besar sekaligus wujud itikad agar diterima sebagai bagian dari dari solidaritas besar nasion Indonesia. Misalnya dalam Pemilu, orang Tionghoa memperlihatkan antusiasme yang besar untuk menggunakan haknya sebagai pemilih sekalipun dengan pesimis mengenai perubahan yang berkenaan dengan marjinalisasinya dalam bidang sosial dan politik. Hasil Pemilu terakhir menurut orang Tionghoa Yogyakarta memperlihatkan itikad baik untuk mengawali keterwakilannya melalui keanggotaan seorang etnik Tionghoa di lembaga politik itu.

Pemerintah Daerah pada era otonomi daerah, menurut perspektif orang Tionghoa tidak memperlihatkan kebijakan-kebijakan yang potensial terhadap konflik berbasis etnik atau agama. Sekalipun situasi kondusif terhadap hubungan

Pribumi-Tionghoa ditunjukkan oleh Pemerintah Daerah namun keistimewaan pemerintahan Yogyakarta di Tingkat propinsi juga menjadikan situasi yang rumit bagi orang Tionghoa Yogyakarta, khususnya dalam larangan pemilikan tanah. Berkenaan dengan masalah *Sultan Ground*, Pemerintah Kota juga tidak dapat berbuat banyak. Pendek kata, sikap dan perilaku negara yang mewujud pada birokrasi pemerintahan dirasakan sebagai bentuk penolakan yang menghambat integrasi sosial orang Tionghoa sebagai bagian dari masyarakat Yogyakarta.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa orang Tionghoa Yogyakarta tidak memperlihatkan kepercayaan terhadap kinerja polisi seperti halnya terhadap pelayanan birokrasi. Penanganan polisi terhadap letupan sentimen anti Tionghoa atau percikan peristiwa dengan sentimen agama sekalipun tidak sampai meluas di Yogyakarta, dipandang tidak serius dan *bias*, menyebabkan orang Tionghoa lebih menyandarkan pada figur pemimpin kultur seperti Sultan. Sosok Sultan menjadi jaminan keamanan Yogyakarta dari konflik yang bersentimen etnis atau pun agama. Adapun untuk mengatasi persoalan kekerasan atau premanisme, orang Tionghoa lebih menyandarkan pada sosok pemuka masyarakat dari organisasi lingkungannya seperti RT atau RW.

Dari analisis pendekatan lingkup suku bangsa, antarsuku bangsa dan peran negara, maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan secara kultur dan penolakan secara sosial dan politik terhadap orang Tionghoa merupakan gambaran umum dalam hubungan Pribumi dan Tionghoa di Yogyakarta. Apabila mengacu kepada variabel-variabel yang dihasilkan dalam hubungan antaretnis oleh Milton Gordon (Gordon dalam Nathan Glazer dan Daniel P Moynihan 1975:84) maka situasi yang dihasilkan dari hubungan Pribumi dan Tionghoa di Yogyakarta dapat dikategorikan sebagai “hanya asimilasi”. Kategori ini mencirikan adanya asimilasi atau akulturasi secara kultural namun di pihak lain prasangka dan diskriminasi tetap berlangsung. Keberadaan orang Tionghoa yang diterima secara kultural dan ditolak secara struktural ini juga menunjukkan bahwa hubungan Pribumi Tionghoa yang bersifat horisontal potensial terhadap konflik demikian dengan hubungan vertikal antara Orang Tionghoa dan negara. Tekanan Pruijt dan Rubin bahwa konflik secara langsung dibangun dari persepsi dan keyakinan bahwa perbedaan kepentingan atau aspirasi tidak dapat dicapai secara simultan (Pruijt dan Rubin 1994: 5) baru menunjukkan potensinya dalam hubungan Pribumi-Tionghoa di Yogyakarta. Adapun kekerasan yang dialami orang Tionghoa adalah kekerasan secara struktural

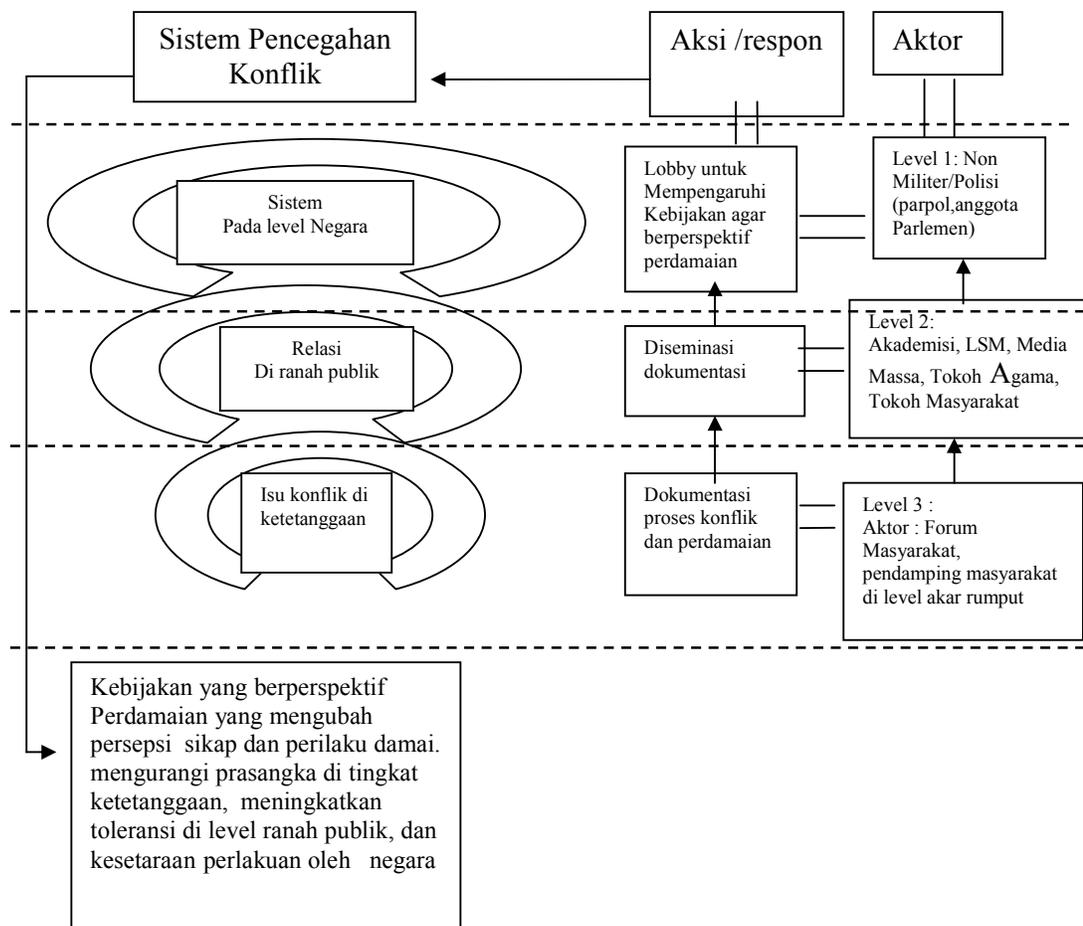
lewat kebijakan negara. Dalam sejumlah kasus Pribumi-Tionghoa di Indonesia, orang Tionghoa akan menjadi sasaran kekerasan pribumi apabila sudah ada konflik laten antara negara dan warganegaranya yang berpola pada adanya prasangka etnik. Pola semacam inilah yang kerap digunakan oleh elit politik guna memobilisasikan massa demi kepentingannya. Di Yogyakarta pola semacam itu tidak terjadi karena antusiasme warga yang besar terhadap informasi media massa diikuti oleh pemahaman kritis terhadap konflik yang terjadi di tingkat nasional. Jadi, mekanisme pencegahan konflik sejauh ini relatif bekerja berkat kultur warga kota yang menaungi hubungan lintas etnik di Yogyakarta. Dalam pengertian Johan Galtung, situasi hubungan antara Pribumi-Tionghoa di Yogyakarta adalah situasi perdamaian yang negatif karena dalam arti luas, Galtung mendefinisikan perdamaian sebagai tercapainya keadilan sosial (Galtung dalam Paul Smoker 1990: 9). Oleh karena itu, tantangan ke depan dalam hubungan Pribumi Tionghoa di Yogyakarta adalah apabila kultur dominan itu melemah dan belum tersedia kultur pengganti yang mampu mengakomodasikan kelompok-kelompok kepentingan tanpa mudah tergoda untuk menggunakan sentimen etnik atau agama sebagai alat pencapaian tujuan politik.

### **Penutup**

Potensi konflik Pribumi dan Tionghoa pertama-tama bersumber pada level negara yang direpresentasikan oleh persepsi, sikap, dan perilaku institusi pemerintah pusat di daerah. Persepsi, sikap, dan perilaku itu sendiri potensial diturunkan menjadi persepsi, sikap, dan perilaku dalam hubungan yang bersifat lintas etnis pada level di ranah publik dengan lestarnya prasangka etnik. Oleh karena itu, langkah pertama adalah membangun model penguatan di level pemerintah daerah. Penguatan ini ditujukan untuk melakukan kontra terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak berperspektif menciptakan perdamaian dalam hubungan antarsuku bangsa atau antaragama. Pemerintah daerah yang lebih mandiri dalam membangun keputusan-keputusan yang mendasarkan pada kebutuhan warganya akan menciptakan sebuah sistem pencegahan konflik yang berbasis kepada masyarakat. Kultur masyarakat Yogyakarta yang terbuka dan mempunyai kesukarelawanan yang besar dalam mengorganisasikan kelompok-kelompok yang berbeda dalam lingkungan ketetanggaan, sejauh ini mampu mencegah konflik yang berbasis etnik dan agama. Oleh karena itu ia juga potensial untuk mengembangkan mekanisme yang serupa di

level yang lebih tinggi, selain juga mengurangi potensi konflik dalam bentuk prasangka dan stereotip masih bekerja di level hubungan antar suku bangsa di ranah publik.

Model yang diistilahkan dengan *Nested Paradigm* adalah mengembangkan sistem pencegahan konflik dengan membangun isu yang potensial terhadap konflik yang terdapat di setiap level. Paradigma ini melihat bahwa isu yang terdapat pada level terendah merupakan turunan dari isu yang lebih besar yang berasal dari level-level di atasnya. Diinspirasi oleh model yang dibangun oleh Maire Dugan seperti dikutip oleh John Paul Lederach (Dugan 1989:78; Lederach 1997:55-60; Lederach 2005:138-140), maka penelitian ini merekomendasikan bentuk penguatan masyarakat untuk membangun mekanisme pencegahan konflik yang potensial diturunkan dari level kebijakan negara di tingkat nasional yang dapat divisualisasikan dalam bentuk alur kerja atau matriks berikut ini di bawah ini:



**Gambar 1**  
**Model Sistem Pencegahan Konflik Berbasis Masyarakat**

| Level Sasaran | Aktor/Leader Mover/Intervener                                      | Respon/Aksi  | Bentuk Pencegahan Konflik   |
|---------------|--|--|---|
| Ketetangaan   | Tokoh masyarakat lokal, Pendamping Masyarakat di level akar rumput | Mendokumentasikan proses konflik dan perdamaian                  | Kebijakan yang berperspektif Perdamaian yang mengubah persepsi sikap dan perilaku yang mengurangi prasangka di tingkat ketetangaan, toleransi di ranah publik, dan kesetaraan perlakuan oleh negara |
| Ranah public  | Akademisi, LSM, Media Massa.                                       | Mendesiminasikan hasil dokumentasi ke saluran-saluran strategis  |   |
| Negara        | Non Militer/Polisi (parpol, anggota Parlemen)                      | Lobby kepada aktor negara (Polisi, Militer, Pempimpin Birokrasi) |   |

**Gambar 2**  
**Bentuk Matriks Sistem Pencegahan Konflik Berbasis Masyarakat**

Adapun model rekomendasi secara sederhana digambarkan sebagai proses untuk memahami konflik-konflik yang terjadi di dalam level ketetangaan yang meliputi apa isu konflik, bagaimana konflik terjadi, dan bagaimana mekanisme perdamaian dilakukan. Pemahaman terhadap konflik dan penyelesaian di tiap level terendah perlu didiseminasikan melalui saluran-saluran yang dianggap memadai yakni kelompok-kelompok yang diidentifikasi sebagai bagian dari masyarakat sipil terutama media massa, lembaga-lembaga pendampingan masyarakat (LSM) dan kelompok intelektual. Kelompok-kelompok itu memiliki basis yang memadai untuk menjadi kelompok penyadar, penekan, dan perantara antara kelompok akar rumput dan institusi di level negara. Kemampuan dalam menjadikan dan mendesiminasikan isu konflik-konflik di level akar rumput menjadi isu yang lahir akibat persepsi, sikap, dan perilaku kebijakan di tingkat negara diharapkan akan menjadi pembelajaran kesadaran untuk mengembangkan sikap dan perilaku kritis untuk merespon konflik yang muncul dan kemampuan mengembangkan mekanisme pencegahan konflik yang berasal dari lingkungan ketetangannya sendiri.

Keberhasilan mengembangkan sistem itu diharapkan akan mengubah persepsi, sikap, dan perilaku kelompok-kelompok dengan basis identitas yang

berbeda-beda dalam interaksinya di ranah publik. Pola-pola interaksi yang terbangun di ranah publik pada gilirannya akan mendesakkan pola-pola yang akulturatif itu menjadi mekanisme penolak kebijakan negara yang tidak berperspektif perdamaian hubungan antarsuku bangsa atau antaragama. Pendek kata, solidaritas antarsuku bangsa atau antaragama yang ditumbuhkan dari bawah yang diorganisasikan oleh para *leader mover* dan *intervener* atau para aktor lewat forum-forum demokratis pada setiap levelnya diharapkan akan menjadi basis pengembangan sistem pencegahan konflik yang berkelanjutan karena mendasarkan pada kebutuhan dan realitas persoalan para penciptanya, yakni anggota masyarakat sendiri.

### **Kepustakaan**

Permata, Alviani, “Proses Pembentukan Batas Identitas Orang Cina di Indonesia: Analisis Tiga Keluarga di Yogyakarta”. Tesis Program Studi Jurusan Ilmu-ilmu Humaniora, Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, 2003.

Bachtiar, Harsya, “Masalah Integrasi Nasional Indonesia” dalam *Prisma No. 8*, Agustus 1976, hlm. 10-11.

Badan Pusat Statistik Prop. *Penduduk Kota Yogyakarta Hasil Sensus Penduduk 2000*. Yogyakarta, BPS Prop. DIY, 2000.

\_\_\_\_\_ (2002) *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2002*. Yogyakarta, BPS Prop. D.I.Y.

Brown, Michael E, dan Sumit Ganguly eds, *Government Policies and Ethnic Relations in Asia and the Pacific*. Cambridge, the MIT Press, 1997.

*Buku Profil Kota Yogyakarta*. Yogyakarta, Kantor Humas dan Informasi Kota Yogyakarta, 2003.

Coppel, Charles A., *Indonesian Chinese in Crisis*. Kuala Lumpur, Oxford University Press, 1883.

\_\_\_\_\_ “Pattern of Chinese Political Activity in Indonesia” dalam *J.A.C. Mackie ed., J.A.C Mackie ed., The Chinese in Indonesia*. London, NELSON and The Australian Institute of International Affair, 1976.

\_\_\_\_\_ *Tionghoa Indonesia dalam Krisis*. terj. oleh Tim Penerjemah PSH. Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1994.

Carey, Peter, *Orang Jawa dan Masyarakat Cina 1755-1825*. terj. Redaksi Pustaka Azet, Jakarta, Pustaka Azet, 1985.

- Coser, L., *The Functions of Social Conflict*. New York, Free Press, 1956.
- Kompas Edisi Jogja* (13 Mei 2005) “Dipersulit Urus Paspor Warga Tionghoa datangi Imigrasi”, hlm. A.
- Dugan, Maire A, “Peace Studies at The Graduate Level” dalam *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Sciences, Vol. 504*, Juli 1989, hlm. 78.
- Galtung, Johan, *Peace by Peaceful Means*. London, SAGE Publications, 1996.
- \_\_\_\_\_ “Violence and Peace” dalam Paul Smoker et.al., eds., *A Reader in Peace Studies*. Oxford , Pergamon Press, 1990.
- Gordon, Milton M., “Toward a General Theory of Racial and Ethnic Group Relations” dalam Nathan Glazer dan Daniel P Moynihan, *Ethnicity: Theory and Experience*. Cambridge, Harvard University Press, 1975.
- Greif, Stuart W., *WNI. Problematik Orang Indonesia Asal Cina*. Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1994.
- Gunawan, Maya, “Masyarakat Muslim Cina di Kotamadya Yogyakarta. Suatu Studi dalam Rangka Integrasi Nasional” Abstrak tesis, *Buletin Antropologi tahun III/1988, Nomer 13*, 1988.
- Gur, Ted Robert, *Minority at Risk*. Washington D.C, United States Institute of Peace Press, 1993.
- Habib, Achmad, *Konflik antaretnik di Pedesaan. Pasang Surut Hubungan Cina-Jawa*. Yogyakarta, LKiS, 2004.
- Jacob, T., *Polemologi: Bacaan tentang Perang dan Damai*. Jakarta, Balai Pustaka, 1992.
- King, Gary, Robert O. Keohane, dan Sidney Verba, *Designing Social Inquiry*. Princeton, New Jersey, Princenton University Press, 1994.
- Kompas Yogyakarta, 12 Agustus 2005*, hlm. C.
- Kwartanada, Didi, “Kolaborasi dan Resinifikasi Cina Kota Yogyakarta pada Jaman jepang 1942-1945” Skripsi Sarjana dalam Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra Univesitas Gadjah Mada, 2000.
- \_\_\_\_\_ “Minoritas Tionghoa dan Fasisme Jepang: Jawa 1942-1945” dalam *Penguasaan Ekonomi dan Siasat Pengusaha Tionghoa*. hlm. 27-30, Yogyakarta, Penerbit Kanisius dan Pusat Studi Realino, 1996.
- Lederach, John Paul, *Building Peace. Sustainable Reconciliation in Divided Societies*. Washington DC, United States Institute of Peace Press, 1997

\_\_\_\_\_ *The Moral Imagination . The Art and Soul of Building Peace.*  
Oxford dan New York, Oxford University Press, 2005.

\_\_\_\_\_ *The Little Book of Conflict Transformation.* Intercourse, PA, Good  
Books, 2003.

Liddle, R William, “Coercion, Co-optation, and the Management of Ethnic Relations in Indonesia“ dalam Michel E. Brown dan Sumit Ganguly eds., *Government Policies and Ethnic Relations in Asia and the Pacific.* Cambridge, the MIT Press, 1997.

Liem, Yusu, *Prasangka terhadap Etnis Cina.* Jakarta, Penerbit Jambatan, 2000.

Lohanda, Mona, “Masalah Cina dalam Perjalanan Sejarah Indonesia” dalam Andreas Pardede et.al., *Antara Prasangka dan Realita. Telaah Kritis Wacana Anti Cina di Indonesia.* Jakarta, Pustaka Inspirasi, 2002.

Mackie, J.A.C., *The Chinese in Indonesia.* Melbourne, Thomas Nelson Australia Ltd dan The Australia Institute of International Affairs, 1976.

Masjkuri dan Sutrisno Kutoyo eds., *Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta.* Yogyakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Inventarisasi dan Kebudayaan Daerah 1976-1977, 1982.

Morese, Janice M., “Designed Funded Qualitative Research” dalam Norman K Denzin dan Yvona S Lincoln eds., *Handbook of Qualitative Research.* London dan New Delhi, Sage Publications, 1994.

Mulyadi, M. Hari dan Soedarmono, *Runtuhnya Kekuasaan Kraton Alit. Studi Radikalisasi Sosial Wong Sala dan Kerusuhan Mei 1998 di Surakarta.* Solo, Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan Surakarta, 1999.

Murniatmo, Gatut (ed), *Pembinaan Disiplin di Lingkungan Masyarakat Kota Yogyakarta.* Yogyakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995.

Pruijt, Rubin D dan S. Kim, *Social Conflict. Escalation, Stalemate and Settlement.* New York, MacGraw Hill, 1994.

Purcell, Victor, *The Chinese in Southeast Asia.* Kuala Lumpur, Oxford University Press, 1981.

Incis (2005) “Riset Antar-Etnik dan Masalah Kebangsaan” dalam [http://www.incis.or.id/bab1\\_56.htm](http://www.incis.or.id/bab1_56.htm)

Soewarno, P.J., *Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974. Sebuah Tinjauan Historis.* Yogyakarta, Penerbit Kanisius, 1994.

- Strauss, Anselm, *Qualitative Analysis for Social Scientists*. Cambridge, University Press, 1990.
- Sukri, A Im'an et.al, *Masa Depan Yogyakarta dalam Bingkai Keistimewaan*. Yogyakarta, Unit Penerbitan Parwi Foundation, 2002.
- Sumardjan, Selo, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. terj. H.J. Koesoemanto. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1981.
- Sumintarsih et.al, *Pembinaan Disiplin di Lingkungan Masyarakat Kota Yogyakarta*. Yogyakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995.
- Suparlan, Parsudi, "Masyarakat Majemuk dan Hubungan Antar-Suku Bangsa" dalam I. Wibowo ed., *Restropeksi dan Rekontektualisasi : Masalah Cina*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama dan Pusat Studi Cina, 1999.
- \_\_\_\_\_ "Perspektif Antropologi Anti Cina" dalam Andreas Pardede et.al, *Antara Prasangka dan Diskriminasi*. Jakarta, Pustaka Inspirasi, 2002.
- Suryadinata, Leo, *Negara dan Etnis Tionghoa*. Jakarta, LP3ES, 2002.
- \_\_\_\_\_ *Politik Tionghoa Peranakan di Jawa 1917-1942*. Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1986.
- Susanto, Andreas, "Orang Cina di Yogyakarta. Antara Penerimaan dan Penolakan" dalam I. Wibowo ed, *Harga Diri yang Harus Dibayar. Sketsa Pergulatan Etnis Cina di Indonesia*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama dan Pusat Studi Cina, 2000.
- Tim Fisipol UGM, "Laporan Akhir Penyusunan Konsep Perumusan Pengembangan Kebijakan Pelestrarian Nilai-nilai Kemasyarakatan" (*Social Capital*), Yogyakarta, t.p., 2000.
- Varney, Ashutosh (2001) "Ethnic Conflict and Civil Society: India and Beyond" dalam *World Politics*, vol 53, April 2001, No.3 hlm. 362.
- Witanto, Eddy Prabowo, "Coppel dan Studi Etnik Cina di Indonesia" *Antropologi Indonesia No. 71*, 2003, hlm. 81.